



International e.V.

Annual Narrative Report

January – December 2020

**(Protection of Women Migrant Workers against
TIP and GBV in Lombok Timur)**

(Reported by ADBMI Foundation)



Ringkasan Dokumen

Laporan ini menjelaskan bagaimana pandemi Covid-19 mengubah pelaksanaan program ADBMI, strategi adaptasi yang dilakukan, serta keberhasilan advokasi agar isu pekerja migran tetap menjadi prioritas dalam pembangunan desa.

1. Dampak Covid-19 terhadap Pekerja Migran dan Program

- Pandemi Covid-19 menjadi faktor terbesar yang memengaruhi pelaksanaan proyek.
- Ribuan PMI asal NTB dipulangkan akibat berakhirnya kontrak kerja, PHK, dan berbagai persoalan di negara tujuan.
- Pengiriman remitansi menurun drastis karena banyak PMI kehilangan pekerjaan atau tidak dapat bekerja selama lockdown.
- Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan PMI sejak Maret 2020 sebelum kembali membuka penempatan secara terbatas pada Agustus 2020 ke 14 negara tujuan.

2. Adaptasi Strategi Program

ADBMI menyesuaikan seluruh kegiatan agar tetap berjalan di tengah pandemi dengan:

- menerapkan protokol kesehatan pada seluruh kegiatan;
- membatasi jumlah peserta;
- mengganti pertunjukan budaya Rudat yang melibatkan ribuan orang menjadi:
 - produksi film pendek,
 - konten media sosial,
 - lomba menggambar bertema pekerja migran.
- Tujuan edukasi mengenai migrasi aman dan Peraturan Desa tetap dipertahankan meskipun medianya berubah.

3. Perkembangan Kebijakan dan Advokasi

Capaian advokasi selama tahun 2020 antara lain:

- Lima desa mulai mengalokasikan anggaran bagi kegiatan perlindungan pekerja migran melalui APBDes.
- ADBMI melakukan advokasi kepada DPMD, Inspektorat, Sekretariat Daerah, BPKP, dan Tenaga Ahli Pendamping Desa.

- Hasil pentingnya adalah dimasukkannya isu pekerja migran dalam Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (PPDD) sebagai dasar hukum desa menganggarkan kegiatan perlindungan PMI.

4. Inovasi Program

Salah satu inovasi baru adalah penyusunan teks khutbah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB.

Materinya membahas berbagai persoalan pekerja migran dari perspektif Islam, antara lain:

- hukum menjadi calo PMI,
 - perempuan bekerja sebagai PMI,
 - pengelolaan keluarga PMI,
 - persoalan perkawinan dan perceraian dalam keluarga migran.
- Khutbah tersebut didistribusikan ke masjid-masjid di desa pengirim PMI sebagai media edukasi masyarakat.

5. Tantangan Program

Beberapa hambatan utama yang dihadapi:

- pembatasan kegiatan akibat pandemi;
- perubahan fokus anggaran pemerintah menjadi penanganan Covid-19;
- data penerima bantuan sosial yang tidak akurat sehingga memicu konflik di masyarakat;
- database pekerja migran yang telah disusun ADBMI belum dimanfaatkan pemerintah sebagai dasar perencanaan program;
- jumlah penerima manfaat menurun karena kegiatan tatap muka berskala besar tidak dapat dilaksanakan.

6. Penguatan Kelembagaan LSD

Keberlanjutan organisasi semakin kuat melalui:

- seluruh lima desa mengalokasikan anggaran operasional LSD pada RKPDes 2021;
- LSD mulai memiliki kas organisasi sendiri;
- LSD semakin aktif menjadi mitra pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan dan advokasi isu pekerja migran.

7. Pendekatan Lintas Isu

Program juga memperkuat:

- Pengurangan kemiskinan, melalui pelatihan ekonomi dan edukasi pengelolaan remitansi.
- Kesetaraan gender, dengan mendorong kepemimpinan perempuan di LSD.
- Keterlibatan pemuda, terutama dalam penyebaran informasi melalui media digital.
- Pengurangan risiko bencana, melalui proyek Community Based Disaster Risk Management (CBDRM).
- Pelestarian budaya lokal, dengan mengubah pesan Rudat menjadi film berbahasa Sasak yang dipublikasikan melalui YouTube dan media sosial.

8. Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional dan SDGs

Program mendukung:

- agenda pembangunan nasional melalui penguatan perlindungan pekerja migran di tingkat desa;
- empat tujuan SDGs:
 - SDG 4 (Pendidikan Berkualitas),
 - SDG 5 (Kesetaraan Gender),
 - SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi),
 - SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

9. Dukungan Pemerintah dan Masyarakat

- Pemerintah daerah (Disnaker, DPMD, DP3AKB, pemerintah desa) menjadi mitra aktif dalam pelaksanaan program.
- Sebanyak 22 kasus pekerja migran dan perkawinan anak berhasil diselesaikan melalui mediasi.
- MUI NTB berkontribusi dalam penyusunan materi khutbah bertema pekerja migran.
- Masyarakat desa menunjukkan dukungan tinggi terhadap penguatan perlindungan pekerja migran melalui berbagai kegiatan dan petisi warga.

Kesimpulan

Laporan tahun 2020 menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak menghentikan program ADBMI, tetapi justru mendorong inovasi dalam pendekatan advokasi dan edukasi. Organisasi berhasil mengalihkan metode kampanye ke media digital, memperkuat

legalitas pendanaan kegiatan pekerja migran melalui Peraturan Bupati tentang prioritas penggunaan Dana Desa, memperluas kolaborasi dengan pemerintah dan MUI, serta memastikan keberlanjutan Lembaga Sosial Desa (LSD) melalui dukungan anggaran desa.